

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Muhammad Fachry Elfarabi

Nomor Mahasiswa : 14313441

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muhammad Fachry Elfarabi

Nomor Mahasiswa : 14313441

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan skripsi ini telah ditulis tangan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Penulis,


Muzakki Nur Hafidza

PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

Nama : Muhammad Fachry Elfarabi

Nomor Mahasiswa : 14313441

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Akhsyim Afandi, Drs.MA.Ec.,Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI
SEKOLAH DI INDONESIA**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD FACHRY ELFARABI**

Nomor Mahasiswa : **14313441**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 13 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Akhyin Afandi, Des., MA., Ph.D.

Penguji : Luk Lak Nazhat El Hasanah, SE., M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”

Umar bin Khatab

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari urusan dunia), maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya kepada Tuhanmulah berharap”

(Q.S. Al Baqarah : 45)

“Remember me, I will remember you”

(Q.S Al Baqarah : 152)

“You never try you never know”

(M.Fachry Elfarabi)

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini saya persembahkan:

- Untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang memberikan semangat serta doa dan nasehat-nasehat yang menjadikan motivasi dalam semangat saya.
- Dosen pembimbing saya Bapak Akhsyim Afandi, Drs. MA. Ec., Ph. D yang telah memberikan arahan serta nasehat kepada saya.
 - Adik-Adik tercinta yang memberikan semangat terbaik.
 - Sahabat-sahabatku yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesahku selama ini
- Terimakasih untuk Bunda, Om Amin, Om fada, Bulek Ria, Bulek Ayie yang tidak pernah berhenti untuk memberikan nasehat kepada saya.
- Terimakasih Tifa Kurnia Asih sekaligus calon istri yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi sampai akhirnya sidang skripsi

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia”** dengan baik. Adanya dukungan semangat, penulis menjadi termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Dwiprpto Agus Hardjito,M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Akhsyim Afandi,Drs.MA.Ec.,Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kepada orang tua yang saya banggakan dan cintai yang mendukung baik serta materi yang tidak bisa terukir ketulusannya.
4. Kepada Tifa Kurnia yang telah memberikan berbagai dukungan serta motivasi dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 FE UII, terimakasih atas saran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini
6. Semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

M. Fachry Elfarabi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vi
Halaman Daftar Isi.....	viii
Halaman Daftar Gambar.....	xi
Halaman Lampiran.....	xii
Halaman Abstrak.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat.....	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAR TEORI.....	7
2.1. Kajian Pustaka.....	7
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1 Pendidikan	14
2.3. Hubungan Antar Variabel.....	16
2.4. Kerangka Pemikiran Konseptual.	18
2.5. Hipotesis Penelitian.	19
BAB III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	20
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3. Metode Analisis Penelitian	23
3.3.1. Regresi Data Panel	23

3.3.2. Model <i>Common Effect</i>	24
3.3.3. Model <i>Fixed Effect</i>	25
3.3.4. Model <i>Random Effect</i>	26
3.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel	26
3.4.1. Uji Chow Test.....	26
3.4.2. Uji Hausman.....	26
3.5. Analisis Statistik.....	27
3.5.1. Penaksiran koefisien determinasi (R^2).....	27
3.5.2. Uji F (uji signifikan secara bersama-sama).....	27
3.5.3. Uji t (uji signifikan secara individu).....	27
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Deskripsi Data Penelitian	29
4.2. Analisis Deskriptif	37
4.3. Hasil Dan Analisis Data.....	39
4.3.1. Uji Statistik F (Uji Chow).....	40
4.3.2. Uji Hausman.....	40
4.3.3. Hasil Estimasi Model Fixed Effect.....	41
4.3.4. Analisis Intercept.....	44
4.4 Analisis Statistik.....	46
4.4.1 Uji t-Statistik.....	46
4.4.2. Uji F	48
4.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi(R^2).....	49
4.5. Pembahasan	49
BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Implikasi	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.....	2
4.1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.....	30
4.2 Grafik Derajat Desentralisasi Fiskal.....	31
4.3 Grafik Dana Pendidikan.....	32
4.4 Grafik Rasio Guru Per Murid.....	33
4.5 Grafik Tingkat Kemiskinan.....	35
4.6 Grafik PDRB per Kapita.....	36
4.7. Grafik Intercept.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Data APS Usia 19-24 Tahun di Indonesia.....	62
Lampiran II	: Data Derajat Desentralisasi Fiskal	63
Lampiran III	: Data Dana Pemerintah Bidang Pendidikan.....	64
Lampiran IV	: Data Rasio GuruPer Murid.....	66
Lampiran V	: Data Prosentase Kemiskinan	67
Lampiran VI	: Data PDRB perKapita.....	68
Lampiran VII	: Hasil Regresi Data Panel (<i>Common Effect Model</i>).....	69
Lampiran VIII	: Hasil Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>).....	70
Lampiran IX	: Hasil Regresi Data Panel (<i>Random Effect Model</i>).....	71
Lampiran X	: Uji Chow Test.....	73
Lampiran XI	: Uji Hausman Test.....	74
Lampiran XII	: Hasil Statistik Deskriptif Data Panel.....	75

ABSTRAK

pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang dan membutuhkan proses yang cukup lama serta biaya yang sangat besar dalam masa pendidikan yang lebih tinggi. Untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah dengan cakupa umur 19 sampai 24 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun Angka Partisipasi Pendidikan di Indonesia selalu berfluktuatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Rasio Guru Per Siswa, Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data *time series* selama lima tahun dari 2011-2015 dan *cross section* sebanyak tiga puluh tiga Provinsi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel (*pooled least squares*) dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan, sedangkan Tingkat Kemiskinan, Rasio Guru PerSiswa dan PDRB per Kapita berpengaruh signifikan terhadap APS. APS merupakan indikator penting yang seharusnya dapat terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kualitas manusia yang lebih berkualitas dan berpengetahuan luas untuk mencapai cita-citanya dengan baik.

Kata Kunci: APS, Derajat Desnetralisasi Fiskal, Dana Pendidikan, Rasio Guru Per Murid, Prosentase Kemiskinan, PDRB per Kapita.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Salah satu faktor utama dalam pembangunan harus adanya sumber daya manusia (SDM) Untuk mendapatkan SDM yang bermutu maka di perlukan pendidikan yang berkualiti.

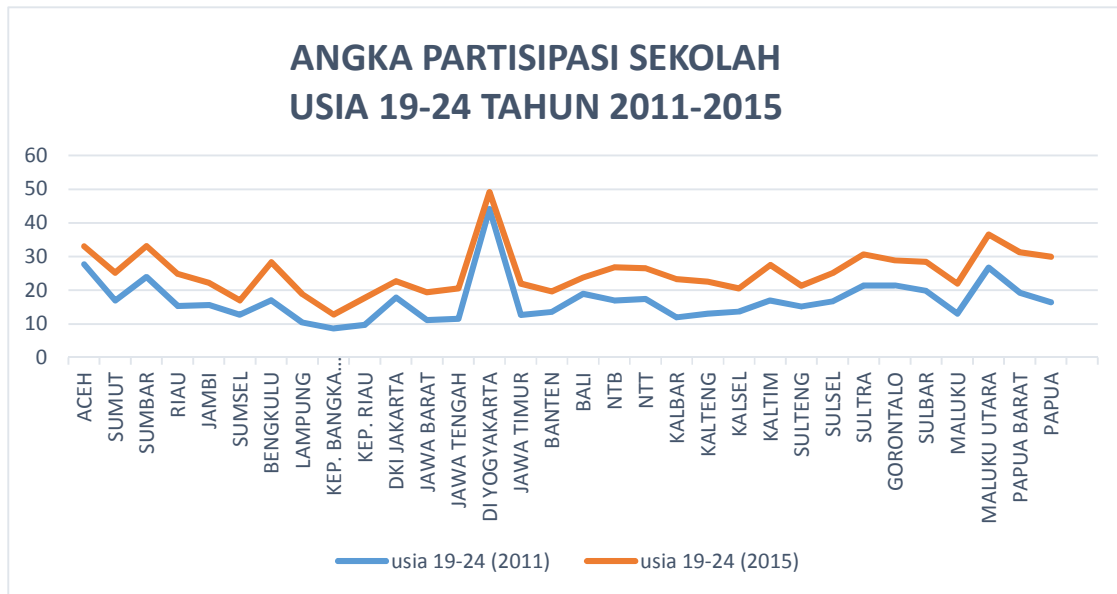
Pendidikan adalah sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Selain itu, pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang dan membutuhkan proses yang cukup lama serta biaya yang sangat besar dalam masa pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Septiana (2008) Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan, pendidikan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka. Untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah. Cakupan pendidikan dalam lingkup ini cukup luas. Usia Pendidikan terdiri dari: (1) usia 6-12 tahun menggenggam pendidikan sekolah dasar, (2) usia 13-15 tahun menggenggam pendidikan sekolah

menengah pertama, (3) usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan (4) usia 19-24 dalam pendidikan perguruan tinggi.

Grafik 1.1

Angka Partisipasi Sekolah Di Indonesia



Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok usia 19-24 thn memiliki peningkatan antara 4.1% hingga 13.52% untuk itu dikategorikan menjadi 3 kelompok, dengan perkembangan dibawah 5%, 5 - 10% dan diatas 10%.

Dari hasil perbandingan tersebut bahwa semakin tinggi perkembangan jumlah partisipasi sekolah kelompok umur 19-24 tahun. Angka Partisipasi Sekolah umur 19-24 tahun di Indonesia memiliki tingkat yang bervariasi antar provinsi, ada yang memiliki partisipasi yang tinggi dan ada juga partisipasi rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah antar provinsi yang bervariasi.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu transfer dana APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menciptakan ketahanan dan pemerataan perekonomian masyarakat antar daerah dengan kebijakan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam memenuhi pelayanan publik bidang pendidikan pemerintah daerah sudah mengalokasikan belanja bidang pendidikan, belanja pendidikan atau dana pendidikan digunakan untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan. Namun, terlepas dari itu alokasi dana pendidikan belum tereleasikan dengan baik, hal ini disebabkan karena perbedaan provinsi dalam penetapan dana pendidikan belum seimbang. yang mengakibatkan persentase tingkat kemiskinan naik. Tingkat kemiskinan akan berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah, pendapatan per kapita yang rendah akan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi sekolah tingkat perguruan tinggi, karena perguruan tinggi akan menghabiskan banyak biaya.

Sejauh ini tidak banyak penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah kelompok umur 19-24 tahun di Indonesia. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji lebih dalam faktor apa sajakah yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah perguruan tinggi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Partisipasi Sekolah?
2. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah?
3. Bagaimana Pengaruh Rasio Guru per Siswa terhadap Angka Partisipasi Sekolah?
4. Bagaimana Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Angka Prtisipasi Sekolah?
5. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap Angka Partisipasi Sekolah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa banyak Rasio Guru per Siswa terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar Persentase Penduduk Miskin terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui seberapa besar PDRB perkapita terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi maka penulis mengadakan penelitian, diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini memuat beberapa penelitian yang dilakukan untuk menjadikan referensi dan pemikiran baru dalam penyusunan skripsi. Berikut merupakan penelitian terdahulu dalam penelitiannya:

Niken Ajeng Lestari (2014) yang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Serta Angka Putus Sekolah Tingkat SD Dan SMP “. Data yang digunakan oleh peneliti adalah regresi data panel tahun 2006-2011 dengan menggunakan metode fixed effect. Dengan Variabel Dependen Angka Partisipasi Sekolah (APK) serta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan variable indenpenden adalah pengeluaran bidang pendidikan, rasio guru dan murid dan jumlah sekolah. Hasil yang di peroleh dari penelitian adalah rasio guru per murid dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap APS APK tingkat SD.

Hasil penelitian Nia Elisa Pegas (2012) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan dan Tenaga Pengajar Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Barat tahun 2011-2012” penelitian ini menggunakan panel fixed effect dan kesimpulannya adalah kemiskinan dan tenaga pengajar tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Penelitian Ummy Zulfa Rahmatin (2017) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya.” Variabel indenpenden yang digunakan tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah dengan kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan. Metode yang digunakan oleh peneliti yakni metode kuantitatif deskriptif.

Penelitian Khairunnisa dan Sri Hatoyo (2011) dengan judul “Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat tahun 2007-2011” metode penelitian yang digunakan panel fixed effect dan varibel independen kemiskinan dan partisipasi kerja. Hasil dari penelitian ini partisipasi kerja berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Angka Partisipasi sekolah.

Penelitian Citra Septiana dan Hutapia (2008) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Sumatra” Variabel yang digunakan pengeluaran pemerintah dalam pendidikan, pendapatan perkapita dan angka kematian bayi. Hasil dari penelitian ini pengeluaran pemerintah dalam pedidikan dan pendaptan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Kematian Bayi berpengaruh negatif terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Penelitian Ageng Sri Pertiwi (2009) dengan judul “Pengaruh karakteristik wilayah terhadap pemerataan Angka Partisipasi Sekolah Menengah Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Magetan” varibel independen yang digunakan adalah fasitlitas pendidikan, kemiskinan dan aksesibilitas unit industri. Metode

penelitian yang digunakan regresi linier berganda dengan kesimpulan bahwa fasilitas pendidikan dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) disusul dengan kemiskinan yang berpengaruh negatif terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Penelitian Nur Berlina VA (2011) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun”

Hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif data sekunder dapat disimpulkan bahwa presentase penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah dan kepadatan penduduk, indeks kapasitas fiskal serta rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah.

Penelitian Noval Akhmad Huda, Hadi Sasana (2013) dengan judul “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan” metode yang digunakan uji normalitas tahun 2006-2010 dengan menggunakan variabel independen desentralisasi fiskal, rasio murid per kelas, PDRB. Hasil dari penelitian ini bahwa desentralisasi fiskal dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan rasio murid per kelas berpengaruh negatif signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Penelitian Umi Khatijah (2015) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan” variabel independen yang digunakan desentralisasi fiskal dan variabel dependen Angka Partisipasi Sekolah hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan

dan pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Penelitian Solechah (2010) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan.” Metode penelitian menggunakan panel tahun 2007-2009 dengan variabel dependen Angka Partisipasi Sekolah dan variabel independen desentralisasi fiskal, pendapatan perkapita serta rasio guru dan murid. Hasil dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah, yang terakhir rasio guru dan murid berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Evawaty Tanuar, Violitta Yesmaya, Edy Irwansyah (2017) dengan judul “Hubungan Partisipasi Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia” metode yang analisis deskriptif data 2011-2016 dengan variabel independen tingkat kemiskinan dan IPM. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil dan Analisis
1	Niken Ajeng Lestari “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Serta Angka Putus Sekolah Tingkat SD Dan SMP	Variable Dependen: APS dan APK Variabel Independen: 1. Pengeluaran Pemerintah 2. Rasio Guru dan Murid 3. Jumlah Sekolah	Rasio guru per murid dan jumlah sekolah berpengaruh positif terhadap APS dan APK Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap APS APK tingkat SD
2	Nia Elisa Pegas “Pengaruh Kemiskinan dan Tenaga Pengajar Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Barat”	Variable Dependen: APS Variable Independen: 1. Kemiskinan 2. Tenaga Pengajar	Kemiskinan dan tenaga pengajar tidak berpengaruh signifikan terhadap APS.
3	Ummy Zulfa Rahmatin “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya.”	Variable Dependen: APS Variabel Independen: 1. Tingkat Kemiskinan 2. Jumlah Sekolah	Tingkat kemiskinan dan jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan.
4	Khairunnisa dan Sri Hatoyo “Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat”	Variable Dependen: APS Variabel independen: 1. Kemiskinan 2. Partisipasi Kerja	Partisipasi Kerja berpengaruh positif terhadap APS Kemiskinan berpengaruh Negatif terhadap APS
5	Citra septiana dan Hutapia	Variable Dependen: APS	Pengeluaran pemerintah dalam pendidikan berpengaruh positif

	“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Sumatera”	Variabel Independen: 1. Pengeluaran pemerintah dalam pendidikan 2.pendapatan perkapita 3.Angka kematian bayi	signifikan terhadap APS Angka kematian bayi berpengaruh negatif terhadap APS
6	Ageng Sri Pertiwi “Pengaruh karakteristik wilayah terhadap pemerataan Angka Partisipasi Sekolah Menengah Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Magetan”	Variable Dependen: APS Variabel Independen: 1.Fasilitas pendidikan 2.Kemiskinan 3.Aksesibilitas dan Unit Industri	Fasilitas pendidikan dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap APS Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap APS
7	Nur Berlian VA “Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun”	Variable Dependen: APS Variabel Independen: 1.Prosentase Penduduk Miskin 2.Indeks Kapasitas Fiskal 3. Kepadatan Penduduk 4.Rata-Rata Lama Sekolah	Prosentase Penduduk Miskin Berpengaruh negatif signifikan terhadap APS Kepadatan penduduk, indeks kapasitas fiskal dan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap APS
8	Noval Akhmad Huda, Hadi Sasana “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”	Variabel Dependen: APS Variabel Independen: 1. Desentralisasi Fiskal 2.Rasio Murid 3. PDRB	Desentralisasi Fiskal dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap APS Rasio Murid Perkelas dan berpengaruh negatif signifikan terhadap APS

9	Umi Khotijah “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan.”	Variabel dependen: APS Variabel dependen: 1. Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan dan pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah
10	Solechah “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan.”	Variabel dependen: APS Variabel independen: 1. Desentralisasi fiskal 2. Pendapatan Perkapita 3. Rasio Guru dan Murid	Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APS Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS Rasio guru dan murid berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap APS
11	Evawaty Tanuar, Violitta Yesmaya, Edy Irwansyah “Hubungan Partisipasi Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia”	Variabel dependen: APS Variabel independen: 1. tingkat Kemiskinan 2. IPM	Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap APS Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap APS

Dalam penelitian ini perbedaan yang ada terhadap penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel dependen yaitu penelitian pada umur 19-24 tahun dan variabel independen yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Guru per siswa, Persentase penduduk miskin dan PDRB per kapita dengan lokasi penelitian di Provinsi Indonesia pada tahun 2011-2015.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi dalam pendidikan adalah gambaran sejauh mana tingkat penyerapan pendidikan formal, dalam pengelompokan usia pada angka partisipasi sekolah Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan empat rentang usia 7-12 tahun untuk sekolah dasar. Usia 13-15 tahun untuk sekolah menengah pertama. Usia 16-18 tahun untuk sekolah menengah ke atas dan usia 19-24 tahun untuk perguruan tinggi. Dalam menghitung angka partisipasi sekolah di gunakan rumus :

$$APS\ 19-24 = \frac{P_{19-24}\ \text{Masih Sekolah}}{P_{19-24}} \times 100\%$$

Dimana APS 19-24 adalah angka partisipasi sekolah penduduk 19-24 tahun, P_{19-24} masih sekolah adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang masih sekolah, P_{19-24} adalah jumlah penduduk usia 19-24 tahun.

Desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah usia 19-24 tahun tidak sangat berpengaruh karena desentralisasi fiskal banyak digunakan untuk kepentingan publik diantaranya kebutuhan kesehatan, tenaga kerja, listrik, air bersih dan pendidikan tingkat SD sampai SMA. Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengurus semua permasalahan di daerah tersebut, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bervariasi setiap provinsi dengan provinsi lain. Hal ini yang menyebabkan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap angka partisipasi usia 19-24 tahun

Menurut teori *human capital* bahwa pendidikan yang tinggi adalah salah satu faktor terpenting akan menghasilkan individu yang memiliki produktivitas tinggi (Schultz, 1961). Semakin tinggi pendidikan individu maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas individu tersebut dalam proses pembangunan dan menyebabkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga.

Arsyad Lincoln (2009) mengemukakan bahwa pendidikan masuk dalam indikator kesejahteraan masyarakat dalam indeks pembangunan manusia serta indeks campuran yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pengetahuan masyarakat yang lebih sejahtera. Pendidikan mampu membantu kemajuan dengan penyediaan sumber daya manusia yang baik. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang tinggi hal ini sangat penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dreher, *et al.* (2006) bahwa ada faktor permintaan dan penawaran yang sangat mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah. Beberapa faktor permintaan yang mempengaruhi antara lain :(1) Pendapatan per kapita (kesejahteraan rumah tangga). (2) Tingkat melek huruf usia dewasa (pendidikan orang tua). (3) Jumlah sekolah dan tingkat urbanisasi penduduk. Sedangkan dari faktor penawaran yaitu (1) Rasio guru terhadap murid. (2) Biaya pendidikan. (3) Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah menurut BPS adalah proporsi anak sekolah pada Usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. BPS membagi kategori menjadi *7-12 tahun, 13 – 15 tahun, 16–18 tahun dan 19 – 24 tahun.*

Ekonomi Pendidikan menurut Elchanan Chon (1979) “Suatu Studi tentang bagaimana manusia membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar bisa menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara kelompok masyarakat”.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia dilakukan terpusat dengan menggunakan negosiasi ke provinsi-provinsi. Ketika terjadi desentralisasi mengenai sektor pendidikan, secara implisit anggaran pendidikan dimasukkan kedalam alokasi anggaran pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbasis pada formula yang ditetapkan yakni berbasis pada potensi penerimaan dan kebutuhan fiskal suatu daerah (Trisnantoro, dkk, 2008). Akibatnya yang terjadi adalah secara praktis sektor pendidikan harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan anggaran. Kebijakan desentralisasi fiskal adalah daerah diberi wewenang menentukan anggaran belanja untuk daerah mereka masing-masing, sehingga fungsi pemerintah daerah di sektor pendidikan, yaitu harus merencanakan dan menganggarkan program pendidikan dan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya

2.3.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Menurut Jean-Paul Faguet dan Fabio Sánchez (2006) jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah. Yang mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

2.3.3 Hubungan Rasio Guru Per Siswa Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Menurut Jean-Paul Faguet dan Fabio Sánchez (2006) dan Salinas Paula, Pena (2007) dengan mengambil studi kasus negara Bolivia serta Spanyol mengungkapkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara rasio murid per guru untuk menggambarkan bagaimana ketersediaan guru di suatu daerah dengan tingkat partisipasi sekolah mempunyai hubungan yang positif yang berarti dengan tersedianya guru di suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah.

2.3.4 Hubungan Persentase Penduduk Miskin Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

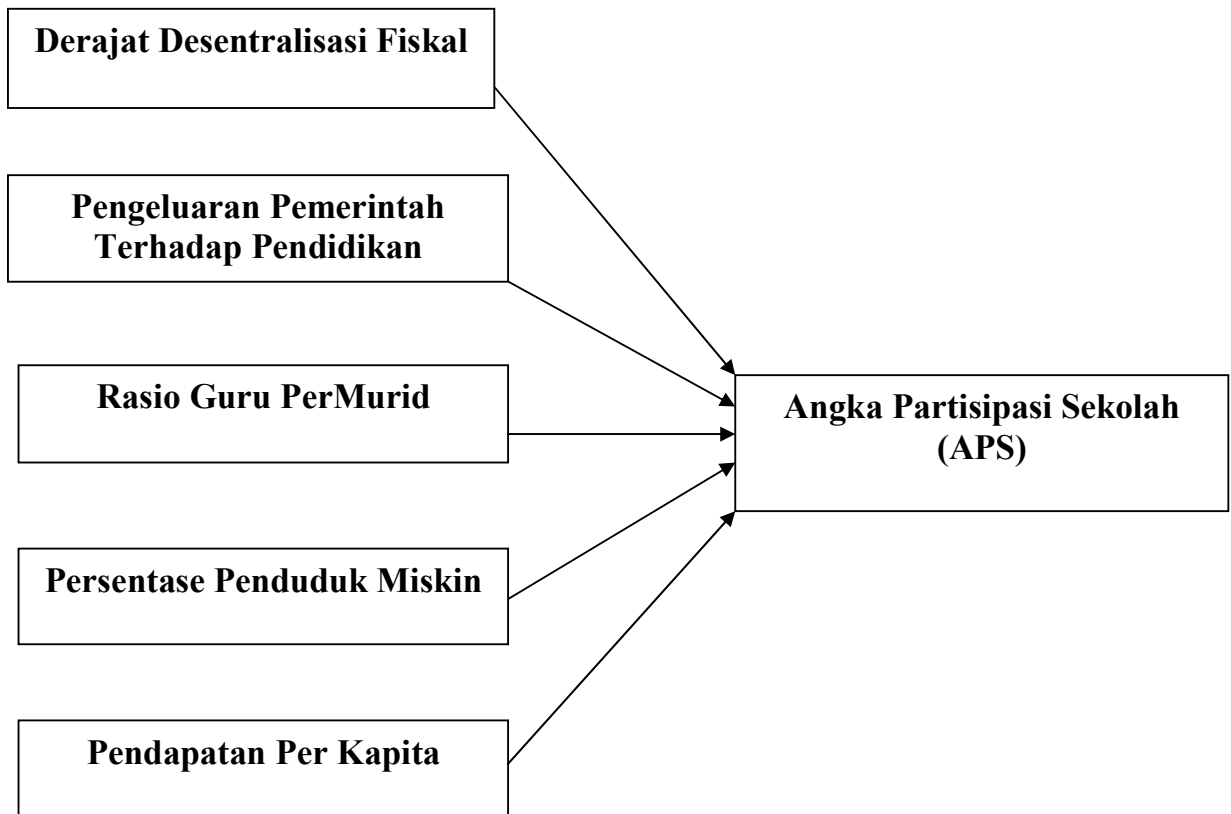
Persentase penduduk miskin menggambarkan kondisi sosial ekonomi dimana semakin banyak orang miskin maka angka partisipasi sekolah akan menurun karena masyarakat miskin memiliki sumber daya yang lebih rendah untuk menempuh jenjang pendidikan.

2.3.5 Hubungan Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Pendapatan per kapita menggambarkan kondisi ekonomi individu dimana semakin tinggi pendapatan yang di peroleh maka angka partisipasi sekolah akan meningkat sebab masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dalam pemenuhan partisipasi sekolah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Pendidikan (APS), maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif pada angka partisipasi terhadap Angka Partisipasi Sekolah pada 33 Provinsi Di Indonesia, artinya jika derajat desentralisasi fiskal meningkat maka Angka Partisipasi Sekolah akan naik.
2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh Positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah pada 33 Provinsi Di Indonesia, artinya jika pengeluaran pemerintah dalam pendidikan meningkat maka Angka Partisipasi Sekolah akan naik.
3. Rasio Guru Per Siswa berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah pada 33 Provinsi Di Indonesia, artinya jika jumlah rasio guru dan siswa meningkat maka Angka Partisipasi Sekolah akan meningkat.
4. Persentase Penduduk Miskin berpengaruh negatif terhadap Angka Partisipasi Sekolah pada 33 Provinsi Di Indonesia, artinya jika jumlah persentase penduduk miskin meningkat maka Angka Partisipasi Sekolah akan menurun.
5. Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah pada 33 Provinsi Di Indonesia, artinya jika jumlah pendapatan perkapita meningkat maka Angka Partisipasi Sekolah akan meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan panel dari tahun 2011-2015. Variabel dependen yang digunakan menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah, sedangkan variabel independen menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Rasio Guru per Siswa, Pendapatan perkapita dan Persentase Penduduk Miskin. Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (Y)

Angka Partisipasi Sekolah adalah standard penerapan pendidikan yang dipakai untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat di Indonesia dalam mengenggam jenjang pendidikan yang akan dicapai. Semakin tinggi partisipasi dalam pendidikan maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermatabat dan lebih baik. Dalam penelitian ini angka partisipasi sekolah 17-24 tahun menggunakan satuan persen.

2. Desentralisasi Fiskal (X1)

Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengelola dan menganalisis kinerja keuangan dalam suatu wilayah provinsi untuk menunjukkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, sehingga akan terlihat kemampuan suatu daerah dalam

penyelenggaraan keuangan yang baik. Untuk mengetahui desentralisasi fiskal peneliti mengaplikasikan perhitungan rasio keuangan, di lihat dari rasio penerimaan PAD antara lain: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah*. Rasio untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut ini (Mahmudi,2010):

$$\text{Derajat Desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X2)

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan adalah besarnya pengeluaran yang digunakan untuk menanggung banyaknya biaya dalam pendidikan di Indonesia. Dapat dilihat dari segi kuantitas Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan tiap tahunnya selalu meningkat. Penelitian ini menggunakan satuan rupiah untuk pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.

4. Rasio Guru Per Murid (X3)

Rasio Guru Per Murid menggambarkan supply side dari penentu angka partisipasi sekolah, semakin kecil rasio guru per siswa menandakan semakin banyak guru yang tersedia, semakin banyak guru yang tersedia maka akan memudahkan masyarakat untuk bersekolah dan berimplikasi pada peningkatan

kesejahteraan. Rasio guru yang digunakan adalah jumlah guru sd sampai sma sederajat di bagi jumlah murid dan penelitian ini menggunakan satuan persen.

5. Persentase Penduduk Miskin (X4)

Persentase Penduduk Miskin menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan atau nonmakanan karena ini bersifat mendasar. BPS menghitung persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan menggunakan indikator *head count index* (HCI). Garis Kemiskinan merupakan besarnya uang yang digunakan untuk per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Penelitian ini menggunakan satuan persen dalam persentase penduduk miskin.

6. Pendapatan Per kapita (X5)

Pendapatan masyarakat adalah PDRB per kapita riil tiap provinsi di Indonesia berdasarkan harga konstan tahun 2000. Variabel ini menggunakan satuan rupiah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penilitin adalah *explentory* dan deskriptif kuantitatif. Metode explentory adalah metode yang menjelaskan hubungan antar variabel dan analisis deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan Angka Partisipasi Sekolah dengan perhitungan sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa catatan

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Data diambil dari gabungan data laporan statistik keuangan daerah runtut waktu dalam rentang tahun 2011-2015 dan data *cross section* dari 33 Provinsi di Indonesia yang di dapatkan langsung dari website dan perpustakaan BPS Indonesia.

3.3 Metode Analisis Penelitian

3.3.1 Model Regresi Data Panel

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel karena metode ini memberikan berbagai keuntungan antara lain data panel menyediakan data yang lebih banyak (gabungan dari dua jenis data yaitu *cross section* dan *time series*) sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Adapun model regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$(APS_{it}) = (DDF_{it} + EDU_{it} + RGS_{it} + POV_{it} + PPK_{it})$$

$$APS_{it} = \alpha + \beta_1 DDF_{it} + \beta_2 EDU_{it} + \beta_3 RGS_{it} + \beta_4 POV_{it} + \beta_5 PPK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

APS = Angka Partisipasi Sekolah periode 2011-2015 (persen)

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal (persen)

EDU = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (Juta Jiwa)

RGS = Rasio Guru Per Siswa (persen)

POV = Presentase Penduduk Miskin (persen)

PPK = Pendapatan Per Kapita (rupiah)

a = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$ = Koefisien Regresi

i =Provinsi

t = Waktu (tahun)

e= error term

Dalam penelitian data panel estimasi data digunakan dalam 3 metode yaitu pendekatan Common Effect,Fixed Effect,dan Random Effect.

3.3.3.1 Common Effect Model

Model common merupakan model yang digabung kemudian diestimasi yang merupakan penggunaan metode *Pooled Least Squares* (PLS) Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variable dependen konstan untuk setiap cross section dan time series. Artinya metode ini tidak memperhitungkan “*nature*” dari perubahan yang terjadi di setiap cross section dan time series sehingga kompleksitas kenyataan sebenarnya tidakdapat dicerminkan dalam metode ini. Persamaan model PLS sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta^0_{it} + \sum_{j=1}^{n=5} \beta_j x_{it} + e_{it}$$

$$i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, K$$

Di mana N adalah jumlah unit cross section (individu) dan T adalah jumlah time series (periode waktu). Proses estimasi menggunakan metode PLS dilakukan dengan menggabungkan unit time series dan unit cross section sehingga menghasilkan jumlah observasi sebanyak NT.

3.3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini memasukan *dummy variabel* untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai intersep antar unit cross section. Metode ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan antara obyek dengan konstan antar obyek.

Persamaan model ini dalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_j x_{itj} + \alpha_i n_i = 2 D_i + U_{it}$$

dimana

$$i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, K$$

keterangan :

Y_{it} = variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i

α_i = intersep yang berubah – ubah antar unit cross section

x_{itj} = variabel bebas ke-j diwaktu t untuk unit cross section i

β_j = parameter untuk variabel bebas ke-j

U_{it} = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

3.3.3.3 Random Effect Model

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012). *Random effect* mengestimasi data panel yang variabelnya diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel dalam penelitian ini.

3.4 Pemilihan Model

3.4.1 Uji Chow Test

Uji Chow Test memiliki tujuan untuk menguji dan memilih model yang digunakan guna membansingkan model *common effect* dengan *fixed effect*, ketika nilai chow statistic (f-stat) lebih besar dari F-tabel maka cukup untuk melakukan penolakan H₀ sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*.

3.4.2 Uji Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect*. Gujarati (2012) menerangkan hipotesis nol yang mendasari uji Hausman adalah bahwa estimator-estimator FEM dan REM tidak memiliki perbedaan yang besar. Uji statistik yang dikembangkan oleh Hausman memiliki distribusi χ^2 asimtotis. Jika hipotesis nol ditolak maka kesimpulannya adalah REM tidak tepat karena

random effects kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam hal ini, FEM lebih baik daripada REM.

3.5 Analisis Statistik

3.5.1 Koefisien Determinan R^2

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan model regresi yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen atau mengetahui kecocokan dari model regresi, yang terletak antara 0 sampai 1.

3.5.2 Uji F

Pada Uji F bertujuan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat hipotesis ditolak atau diterima yaitu dengan membandingkan nilai F-stat dengan nilai kritisnya. Jika F-stat lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

3.5.3 Uji T

Uji t ini bertujuan untuk melihat secara individual apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak.

Pengambilan keputusan hipotesis dapat dilihat dari probabilitasnya (p-value) dengan tingkat keyakinan alpha. Keputusan hipotesis adalah sebagai berikut:

nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha (α) maka H_0 ditolak, sehingga variable tidak berpengaruh signifikan.

nilai p-value lebih besar dari nilai alpha (α) maka H_0 diterima dan variable berpengaruh secara signifikan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

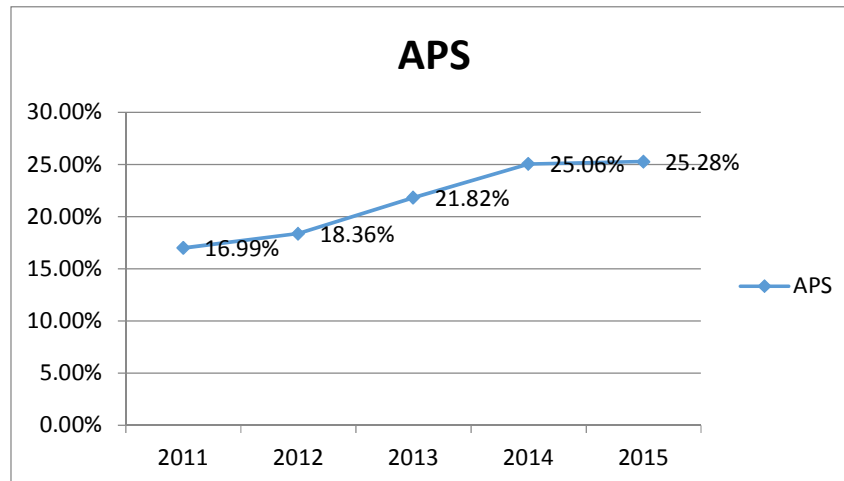
4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil pengujian dan hasil akhir estimasi. Dalam penelitian ini data yang diolah diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia Dirjen Pengelolaan Keuangan Daerah (DJPk) Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2015. Berdasarkan data tersebut diperoleh 165 observasi (N) yang merupakan gabungan dari data *time series* tahun 2011-2015 dan data *cross section* 33 Provinsi di Indonesia. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang menampilkan deskripsi data dan grafik variabel dependen terhadap variabel independen

4.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah menunjukkan kondisi pendidikan suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu sarana bagi pemerintahan suatu daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa bersaing dalam persaingan global. Pendidikan dalam penelitian ini diukur dengan angka partisipasi sekolah pada jenjang umur 19 sampai dengan 24 tahun.

Gambar Grafik 4.1
Angka Partisipasi Sekolah (19-24 tahun) Provinsi di 2011-2015



Sumber : Data Diolah, 2018

Dari perkembangan tingkat data pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang selalu meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Angka partisipasi sekolah tertinggi pada tahun 2013 sebesar 25,28% sedangkan angka partisipasi sekolah terendah pada tahun 2011 sebesar 16,99%.

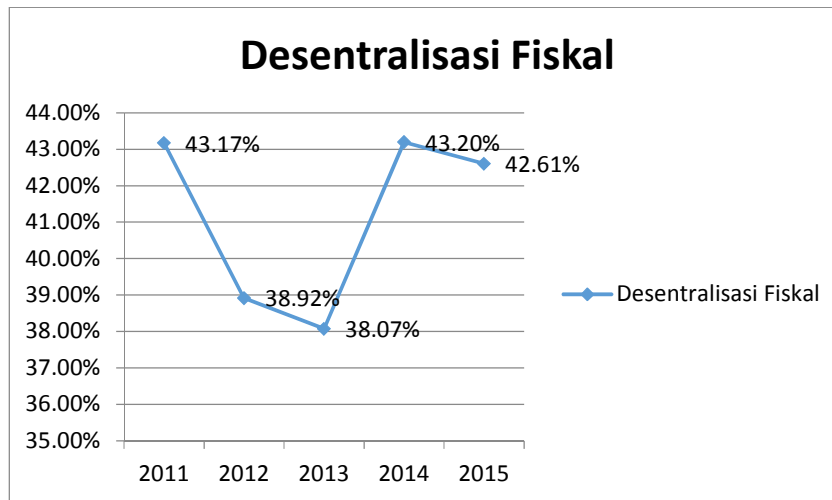
4.1.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan cara membandingkan pendapatan asli

daerah (PAD) dengan total pendapatan. Analisis dari desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

Gambar Grafik 4.2

Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Indonesia 2011-2015



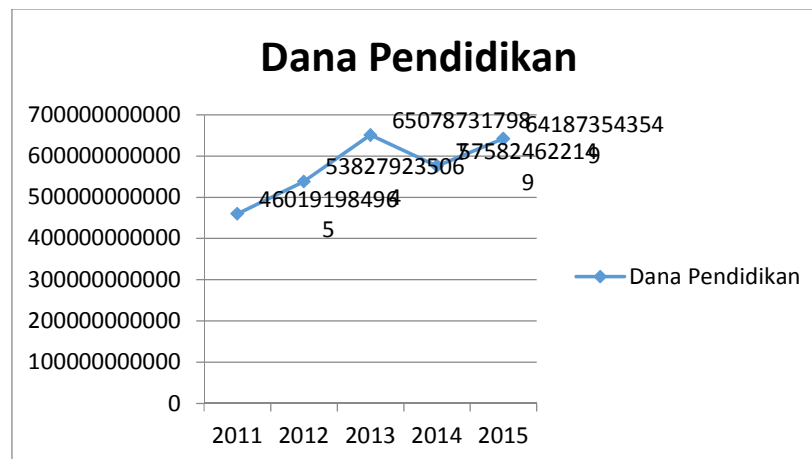
Grafik 4.2 diatas menjelaskan bahwa perkembangan desentralisasi fiskal provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Perkembangan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu terjadi pada tahun 2014 dengan angka mencapai angka 43,20% dan perkembangan terendah di tahun 2013 sebesar 38,07%. Perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia masih belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala dan masalah seperti kemampuan daerah dalam mendapatkan pendapatan asli mereka masih rendah dan mengingat luasnya wilayah serta besarnya jumlah penduduk dengan berbagai ragam karakteristiknya.

4.1.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Dana pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar Grafik 4.3

Dana Pendidikan Provinsi di 2011-2015



Sumber : Data Diolah, 2018

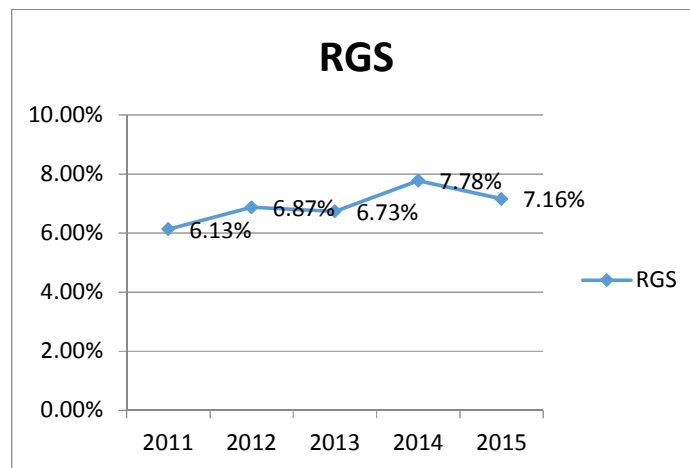
Dari perkembangan tingkat data pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang selalu meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dan menurun di tahun 2014 dan kembali meningkat di tahun 2015. Dana pendidikan

tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp. 650.787.317.987,- sedangkan dana pendidikan terendah pada tahun 2011 sebesar Rp. 460.191.984.965,-.

4.1.4 Rasio Guru Terhadap Siswa

Rasio ini merupakan salah satu indikator untuk menilai kemajuan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tersedianya guru merupakan penyediaan sarana publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dan merupakan input di bidang pendidikan. Sebagai input pendidikan, tersedianya guru berperan sebagai pendidik yang menentukan bagaimana kualitas murid dan *output* pendidikan lain baik dari segi akademis dan non akademis

Gambar Grafik 4.4
Rasio Guru Terhadap Murid Provinsi di Indonesia 2011-2015



Sumber : Data Diolah, 2018

Dari perkembangan tingkat data rasio guru terhadap siswa di Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2011 sampai dengan

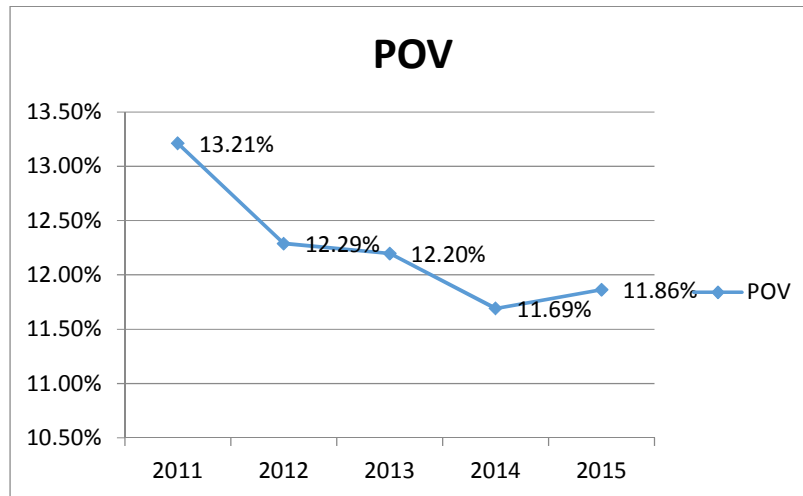
2015. Data rasio guru terhadap siswa pada tahun 2014 sebesar 7,78% sedangkan angka partisipasi sekolah terendah pada tahun 2011 sebesar 6,13%.

4.1.5 Kemiskinan (PROV)

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Kemiskinan merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan menyebabkan timbulnya beberapa faktor-faktor lain, seperti meningkatnya pengangguran, menurunkan pendidikan dan kesehatan yang ada di lingkungannya dan tidak mudahnya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Hal tersebut merupakan kegagalan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat. Kemiskinan diukur dalam satuan persen.

Gambar Grafik 4.5

Kemiskinan di Indonesia 2011-2015



Sumber : Data Diolah, 2018

Dari perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami perkembangan yang selalu menurun dari tahun 2011 sampai dengan 2014. kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,69% sedangkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah sebesar 13,21% pada tahun 2011.

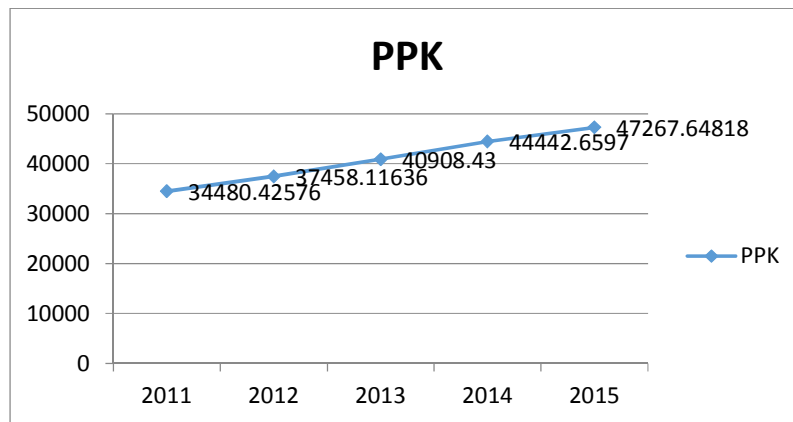
4.1.6 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan per kapita yang meningkat

merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan perkapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.

Gambar Grafik 4.6

Pendapatan Per Kapita di Indonesia 2011-2015



Sumber : Data Diolah, 2018

Dari perkembangan pendapatan per kapita di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat. Pendapatan per kapita terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 34480,42576 sedangkan Pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia sebesar 47267,64818 pada tahun 2015.

4.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai *mean*, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Analisis statistik deskriptif dihitung menggunakan bantuan Eviews 9. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	APS?	EDU?	DF?	RGS?	POV?	PPK?
Mean	0.215015	5.73E+11	0.393159	0.069413	0.122504	40911.46
Maximum	0.491700	1.28E+13	0.786960	0.107520	0.319800	195455.3
Minimum	0.086300	1.95E+10	0.029230	0.039560	0.036100	10194.01
Std. Dev.	0.074582	1.67E+12	0.190846	0.012396	0.064328	34376.92
Observations	165	165	165	165	165	165
Cross sections	33	33	33	33	33	33

Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder, 2018

1. Nilai minimum angka partisipasi sekolah adalah sebesar 0,0863 yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung, sedangkan nilai maksimum angka partisipasi sekolah adalah sebesar 0,4917 atau 49,17% yang diperoleh Provinsi DIY. Nilai rata-rata angka partisipasi sekolah di Indonesia tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,215015 atau 21,5015% dengan standar deviasi sebesar 0.074582. Nilai rata-rata angka partisipasi sekolah di Indonesia tahun 2011-2015 dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi sekolah usia 24 tahun di Indonesia adalah sebesar 21,5015%. Nilai standar deviasi menunjukkan ukuran penyebaran data variabel angka partisipasi sekolah adalah sebesar 0.074582.

2. Nilai minimum desentralisasi fiskal adalah sebesar 0,02923 atau 2,923% yang diperoleh Papua Barat, sedangkan nilai maksimum desentralisasi fiskal adalah sebesar 0,786960 atau 78,6960% yang diperoleh provinsi Jawa Timur. Nilai rata-rata desentralisasi fiskal di Indonesia tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,393159 atau 39,3159% dengan standar deviasi sebesar 0,190846. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan mereka sendiri adalah sebesar 39,3159%. Nilai standar deviasi menunjukkan ukuran penyebaran data variabel desentralisais fiskal adalah sebesar 0,190846.
3. Nilai minimum dana pendidikan adalah sebesar $1.95E+10$ yang diperoleh Provinsi Maluku Utara, sedangkan nilai maksimum dana pendidikan adalah sebesar $1.28E+13$ yang diperoleh Provinsi DKI Jakarta. Nilai rata-rata dana pendidikan tahun 2011-2015 adalah sebesar $5.73E+11$ dengan standar deviasi sebesar $1.67E+12$. Nilai rata-rata dana pendidikan di Indonesia dapat diartikan bahwa tingkat dana APBD yang dialokasikan untuk pendidikan adalah sebesar $5.73E+11$. Nilai standar deviasi menunjukkan ukuran penyebaran data variabel dana pendidikan adalah sebesar $1.67E+12$.
4. Nilai minimum rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 0,03956 atau 3,956% yang diperoleh Papua Barat, sedangkan nilai maksimum rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 0,10752 atau 10,752% yang diperoleh Provinsi NAD. Nilai rata-rata rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 0,069413 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,012396. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa adalah perbandingan jumlah guru per satu siswa adalah 6,9413%. Nilai standar

deviasi menunjukkan ukuran penyebaran data variabel rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 6,9413%.

5. Nilai minimum tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,0361 atau 3,61% yang diperoleh DKI Jakarta, sedangkan nilai maksimum tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,3198 atau 31,98% yang diperoleh Papua. Nilai rata-rata tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,122504 atau 12,2504% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,064328. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa adalah prosentase jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 12,2504%. Nilai standar deviasi menunjukkan ukuran penyebaran data variabel kemiskinan adalah sebesar 0,064328.
6. Nilai minimum pendapatan per kapita adalah sebesar 10194,01 yang diperoleh NTT, sedangkan nilai maksimum pendapatan per kapita adalah sebesar 195455,3 yang diperoleh Jakarta. Nilai rata-rata tingkat pendapatan per kapita adalah sebesar 40911,46 dengan nilai standar deviasi sebesar 34376,92. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa adalah prosentase pendapatan perkapita di Indonesia adalah 40911,46. Nilai standar deviasi menunjukkan ukuran penyebaran data variabel pendapatan per kapita adalah sebesar 34376,92..

4.3 Hasil dan Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil-hasil pengujian dan hasil akhir estimasi. Pengujian yang dilakukan antara lain penaksiran model penelitian, pembahasan hasil estimasi, uji statistik, uji hipotesis, dan analisis Ekonomi.

Langkah awal dalam pengujian regresi data panel yaitu melalui pengujian penaksiran model penelitian. Pengujian ini digunakan untuk melihat model penaksiran regresi data panel yang tepat untuk melakukan estimasi. Pengujian penaksiran model penelitian terdiri dari :

1. Chow Test

Uji Chow atau dapat disebut juga uji statistik F berguna untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan model PLS dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM dapat dilakukan dengan uji statistik F. Dari hasil regresi berdasarkan metode *fixed effect* dan *Pooled Least Square* menggunakan uji chow diperoleh nilai F-statistik adalah 662,350188 dengan nilai pvalue sebesar 0,000, sehingga pvalue <0,05, maka H0 ditolak sehingga model data yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: POOL				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	37.266107	(32,127)	0.0000	
Cross-section Chi-square	386.237405	32	0.0000	

Sumber : Hasil Pengolahan data dengan Iveys 9,2018

2. Hausman Test

Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect model*, model data panel dibandingkan lagi antara *fixed effect model* dengan *random*

effect. Uji hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik dari model *random effect*. Dari hasil regresi diperoleh hasil pengujian Hausman untuk *Random Effect* dengan *Fixed Effect* diperoleh Probabilitas *Cross sectionrandom* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah *fixed Effect Model*.

Tabel 4.3

Hasil Uji Hausman test

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: POOL				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		89.511576	5	0.0000

Sumber : Data Diolah menggunakan eviews 9, 2018

4.3.1 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal (DF), dana pendidikan (EDU), rasio guru terhadap siswa (RGS), kemiskinan (POV), dan pendapatan per kapita (PPK) terhadap angka partisipasi sekolah (APS) menggunakan model regresi data panel *fixed effect*. Pada Metode FEM, intersep pada regresi dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepnnya dapat digunakan peubah

dummy, sehingga metode ini dikenal juga dengan model Least Square Dummy

Variabel (LSDV). Hasil estimasi model regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Analisis Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect

Dependent Variable: APS?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/11/18 Time: 19:15				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.256380	0.043270	5.925139	0.0000
DF?	0.020496	0.050458	0.406211	0.6853
EDU?	8.03E-15	6.02E-15	1.332105	0.1852
RGS?	0.687656	0.266519	2.580135	0.0110
POV?	-1.706016	0.256314	-6.655960	0.0000
PPK?	2.62E-06	3.48E-07	7.529512	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	0.215446			
_SUMUT--C	-0.011983			
_SUMBAR--C	0.029816			
_RIAU--C	-0.230620			
_JAMBI--C	-0.076928			
_SUMSEL--C	-0.026857			
_BENGKULU--C	0.167234			
_LAMPUNG--C	0.023110			
_DKI--C	-0.537021			
_JABAR--C	-0.063668			
_JATENG--C	0.011446			
_DIY--C	0.340425			
_JATIM--C	-0.008967			
_KALBAR--C	-0.050568			
_KALTENG--C	-0.120977			
_KALSEL--C	-0.146619			
_KALTIM--C	-0.365009			
_SULUT--C	-0.072200			
_SULTENG--C	0.068681			
_SULSEL--C	0.030421			
_SULTRA--C	0.093149			
_BALI--C	-0.115892			
_NTB--C	0.154940			
_NTT--C	0.241136			
_MALUKU--C	0.311897			

_PAPUA--C	0.283420			
_BANTEN--C	0.035859			
_BANGBEL--C	-0.130039			
_GORONTALO--C	-0.216188			
_KEPRI--C	0.180680			
_PABAR--C	-0.292026			
_SULBAR--C	0.246064			
_MALUT--C	0.031839			
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.917635	Mean dependent var	0.215015	
Adjusted R-squared	0.893639	S.D. dependent var	0.074582	
S.E. of regression	0.024323	Akaike info criterion	-	
			4.395914	
Sum squared resid	0.075136	Schwarz criterion	-	
			3.680605	
Log likelihood	400.6629	Hannan-Quinn criter.	-	
			4.105545	
F-statistic	38.24116	Durbin-Watson stat	1.285420	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis model regresi data panel, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$APS = 0,357 - 0,020DF? + 8,03E-15EDU? + 0,68RGS? + 1,706POV? + 2,62E-06PPK?$$

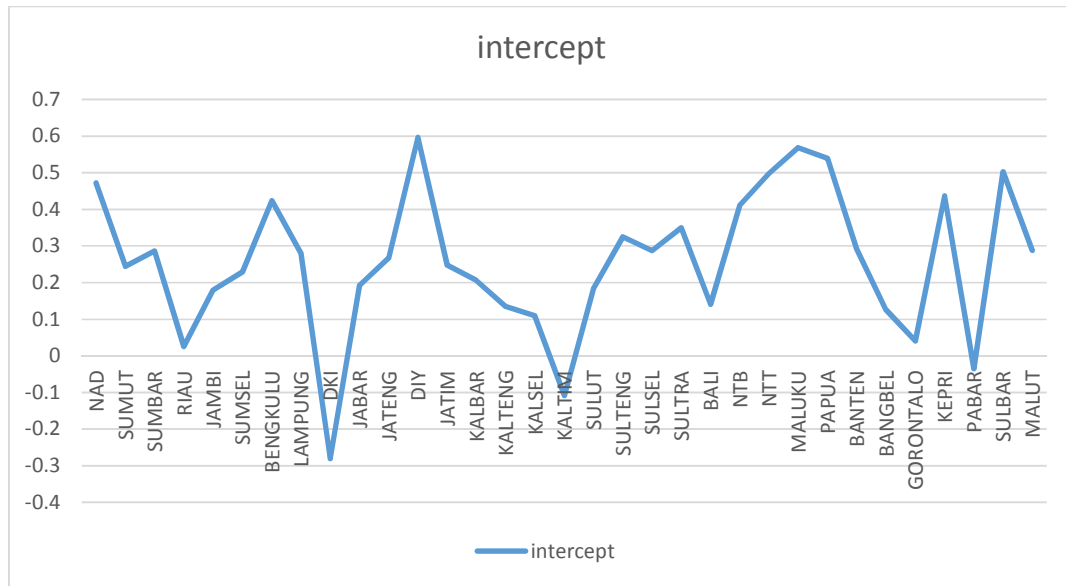
Dari hasil analisis regresi data panel, maka analisis intercept adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5**Analisis Intercept**

Provinsi	Intercept	Konstanta	Hasil intercept
NAD	0,215446	0,25638	0,471826
SUMUT	-0,01198	0,25638	0,244397
SUMBAR	0,029816	0,25638	0,286196
RIAU	-0,23062	0,25638	0,02576
JAMBI	-0,07693	0,25638	0,179452
SUMSEL	-0,02686	0,25638	0,229523
BENGKULU	0,167234	0,25638	0,423614
LAMPUNG	0,02311	0,25638	0,27949
DKI	-0,53702	0,25638	-0,28064
JABAR	-0,06367	0,25638	0,192712
JATENG	0,011446	0,25638	0,267826
DIY	0,340425	0,25638	0,596805
JATIM	-0,00897	0,25638	0,247413
KALBAR	-0,05057	0,25638	0,205812
KALTENG	-0,12098	0,25638	0,135403
KALSEL	-0,14662	0,25638	0,109761
KALTIM	-0,36501	0,25638	-0,10863
SULUT	-0,0722	0,25638	0,18418
SULTENG	0,068681	0,25638	0,325061
SULSEL	0,030421	0,25638	0,286801
SULTRA	0,093149	0,25638	0,349529
BALI	-0,11589	0,25638	0,140488
NTB	0,15494	0,25638	0,41132
NTT	0,241136	0,25638	0,497516
MALUKU	0,311897	0,25638	0,568277
PAPUA	0,28342	0,25638	0,5398
BANTEN	0,035859	0,25638	0,292239
BANGBEL	-0,13004	0,25638	0,126341
GORONTALO	-0,21619	0,25638	0,040192
KEPRI	0,18068	0,25638	0,43706
PABAR	-0,29203	0,25638	-0,03565
SULBAR	0,246064	0,25638	0,502444
MALUT	0,031839	0,25638	0,288219

Sumber : Data Diolah, 2017

Grafik 4.7
Analisis Intercept



Dari Tabel 4.4 didapatkan bahwa DIY, NAD, NTT, Maluku, dan Sulbar Belitung memiliki nilai konstanta yang tinggi, sehingga apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka DIY, NAD, NTT, Maluku, dan Sulbar memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi, artinya DIY, NAD, NTT, Maluku, dan Sulbar memiliki tingkat angka partisipasi sekolah yang baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa tengah. Sedangkan DKI, Kalimantan Timur, dan papua Barat memiliki nilai konstanta yang paling rendah, apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka DKI, Kalimantan Timur, dan papua Barat memiliki angka partisipasi sekolah yang rendah, artinya DKI, Kalimantan Timur, dan papua Barat memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

4.4 Analisis Statistik

Analisis statistik bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai signifikansi yaitu tingkat penting (nyata) secara statistik dan kebaikan sesuai (*goodness of fit*) variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, akan dijabarkan lebih lanjut tentang variabel-variabel tersebut secara individu (uji t), secara serempak (uji F), dan pengujian koefisien determinasi (R^2) dari hasil estimasi regresi data panel.

4.4.1 Analisis Uji t

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5\%$. Jika t-hitung < t-tabel, berarti H_0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-hitung > t-tabel, berarti H_0 ditolak atau variabel independen berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen. Dengan menentukan tingkat signifikansi pada level $\alpha = 5\%$, maka akan diperoleh nilai t tabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= \{ \alpha ; (n-k) \} \\ &= \{ 0,05 ; (165-5) \} \\ &= \{ 0,05 ; 160 \} \\ &= \mathbf{1,96} \end{aligned}$$

Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel DF (Desentralisasi fiskal).

Koefisien regresi dari variabel DF (Desentralisasi fiskal) adalah 0,020496 dan sedangkan untuk t-hitung adalah 0,406211. Karena nilai t-hitung adalah

$0,406211 < t \text{ table}$ adalah **1,96** maka H_0 gagal ditolak dan H_a gagal diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah sehingga hipotesis pertama tidak didukung.

2. Pengujian terhadap variabel EDU (Dana Pendidikan).

Koefisien regresi dari variabel EDU (dana pendidikan) adalah $8,03E-15$ dan sedangkan untuk t-hitung adalah $1,332105$. Karena nilai t-hitung adalah $1,332105 < t \text{ table}$ adalah **1,96** maka H_0 gagal ditolak dan H_a gagal diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa dana pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah sehingga hipotesis kedua tidak didukung.

3. Pengujian terhadap variabel rasio guru terhadap siswa (RGS).

Koefisien regresi dari variabel rasio guru terhadap siswa adalah $0,687656$ dan sedangkan untuk t-hitung adalah $2,580135$. Karena nilai t-hitung adalah $2,580135 > t \text{ table}$ adalah **1,96** maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa rasio guru terhadap siswa berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah sehingga hipotesis ketiga didukung.

4. Pengujian terhadap variabel kemiskinan (POV).

Koefisien regresi dari variabel rasio kemiskinan adalah $-1,706016$ dan sedangkan untuk t-hitung adalah $-6,655960$. Karena nilai t-hitung adalah $-6,655960 < -t \text{ table}$ adalah **-1,96** maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif

signifikan terhadap angka partisipasi sekolah sehingga hipotesis keempat didukung.

5. Pengujian terhadap variabel pendapatan per kapita (PPK).

Koefisien regresi dari variabel rasio pendapatan per kapita adalah 2,62E-06 dan sedangkan untuk t-hitung adalah 7,529512. Karena nilai t-hitung adalah $7,529512 > t \text{ table}$ adalah **1,96** maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap desentralisasi fiskal sehingga hipotesis kelima didukung.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Hasil perhitungan yang di dapat adalah F hitung **38,24116**

Untuk mencari F tabel maka,

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= \{ \alpha; df (k-1); (n-k) \} \\ &= \{ 0,05; (6-1); (165-5) \} \\ &= \{ 0,05; 5; 160 \} \\ &= \mathbf{2,27} \end{aligned}$$

karena F hitung $> F \text{ tabel}$, yaitu **38,24116** $> \mathbf{2,27}$ maka H_0 ditolak. Artinya desentralisasi fiskal (DF), dana pendidikan (EDU), rasio guru terhadap siswa (RGS), kemiskinan (POV), dan pendapatan per kapita (PPK) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah (APS).

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran koefisien determinasi (Adjusted R^2) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,917635. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 91,7635% dan sisanya sebesar 8,2365% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah. Hasil ini membuktikan bahwa perubahan Desentralisasi Fiskal tidak akan mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia.

Salah satu kebijakan desentralisasi fiskal adalah daerah diberi wewenang menentukan anggaran belanja untuk daerah mereka masing-masing, sehingga fungsi pemerintah daerah di sektor pendidikan, yaitu harus merencanakan dan menganggarkan program pendidikan dan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya. Salah satu risiko dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dari sudut pandang pembiayaan kesehatan terletak pada kemungkinan bahwa

pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor pendidikan. Hasil ini disebabkan karena lulusan pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Dapat dilihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah umur 19-24 tahun hanya sebesar 21,5015%. Rendahnya lulusan perguruan tinggi di Indonesia, menyebabkan setiap daerah memiliki kekurangan tenaga ahli disetiap bidangnya sehingga hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi daerah dan berakibat kepada tidak adanya kemampuan daerah dalam mendapatkan PAD.

Hasil ini berbeda dengan dengan penelitian Noval Ahmad Huda (2010) yang menemukan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah

4.4.2 Pengaruh Dana Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil penelitian membuktikan bahwa dana pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Hasil ini membuktikan bahwa perubahan dana pendidikan tidak akan mempengaruhi tingkat angka partisipasi sekolah di Indonesia.

Hasil ini penelitian ini disebabkan karena dana pendidikan di Indonesia digunakan untuk membiayai sekolah menengah atas ke bawah sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi angka partisipasi sekolah pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk memenuhi pelayanan pendidikan yang telah di rencanakan pemerintah tersebut maka pemerintah melalui fungsi anggarannya mengalokasikan belanja pembangunan untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan itu nantinya akan di gunakan sebagai biaya operasional pelaksanaan

pendidikan, dan biaya-biaya lain yang di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pendidikan tersebut sehingga alokasi dana pendidikan tidak akan mempengaruhi angka partisipasi sekolah di Indonesia

4.4.3 Pengaruh Rasio Guru terhadap murid Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil penelitian membuktikan bahwa banyaknya Rasio Guru terhadap murid berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen rasio guru terhadap murid akan meningkatkan angka partisipasi sekolah sebesar 0,687656 %

Hal ini membuktikan bahwa apabila semakin banyak siswa yang berpartisipasi dalam pendidikan, semakin banyak murid yang harus di kontrol oleh seorang guru. sebab pendidikan menjadi syarat mutlak dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Hal kedepan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah guru yang ada agar beban tanggungan guru pada tingkat ini dapat terus berkurang, Sebagai input pendidikan, tersedianya guru berperan sebagai pendidik yang menentukan bagaimana kualitas murid dan *output* pendidikan lain baik dari segi akademis dan non akademis

Hasil ini sesuai penelitian Solecha (2010) yang menemukan hasil bahwa Rasio Guru terhadap murid berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah

4.4.4 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil penelitian membuktikan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen kemiskinan akan menurunkan angka partisipasi sekolah sebesar -1,706016%. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan. Keberadaan sekolah yang belum tersedia di sekitar tempat tinggal mereka, dapat membatasi pengetahuannya dalam mengakses pendidikan, untuk mencapai pendidikan bermutu dengan adanya kebijakan pendidikan dan budget, kurikulum dan sarana juga merupakan bagian infrastruktur, menjadi faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan nasional

Hasil ini sesuai penelitian Umi Zulfa Rahmatin (2017) yang menemukan hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah

4.4.5 Pengaruh pendapatan Per Kapita Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Indonesia perlu ditingkatkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat, dengan adanya pendapatan perkapita yang tinggi dari masyarakat tentunya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sehingga pada akhirnya angka partisipasi sekolah (APS) Indonesia menjadi lebih tinggi. Investasi sumberdaya manusia melalui pendidikan haruslah disadari oleh semua pihak

untuk meningkatkan nilai ekonomi di masa yang akan datang, Perlu disadari bahwa pendidikan erat kaitannya dengan tingkat penghasilan keluarga, uang pendidikan, fasilitas pendidikan dan faktor lain yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri.

Hasil ini sesuai penelitian Noval Ahmad (2010) yang menemukan hasil pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengolahan data penelitian yang sudah diselesaikan pada 33 provinsi di Indonesia selama 2011-2015 ini tentang menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah umur 19-24 tahun di Indonesia. Berdasarkan bab sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang di peroleh antara lain :

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Hasil ini dikarenakan pemerintah masih merencanakan dan menganggarkan program pendidikan dan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya. Khususnya dari sektor kesehatan pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor pendidikan. Hasil ini disebabkan karena lulusan pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah dengan melihat dari rata-rata angka partisipasi sekolah umur 19-24 tahun hanya sebesar 21,5015%
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel dana pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah tidak terdapat pengaruh yang signifikan karena dana pendidikan sudah di atur dalam Undang-Undang sisdiknas pasal 49 ayat 1 (tentang pengalokasian dana pendidikan) yang intinya penganggaran di bidang pendidikan hanya sebesar 20% dari dari total alokasi belanja daerah Padahal biaya

untuk bidang pendidikan di Indonesia sangat besar dan tiap tahun biaya pendidikan pasti naik. Selain itu mayoritas dana pendidikan di Indonesia di alokasikan pada tingkat sekolah menengah ke atas.

3. Penelitian membuktikan bahwa antara variabel rasio guru terhadap siswa berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Dibuktikan dengan setiap 1 persen rasio guru terhadap murid akan meningkatkan angka partisipasi sekolah sebesar 0,687656%

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel kemiskinan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia berpengaruh negatif signifikan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan masalah pokok pembangunan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan. Adanya kendala ekonomi, masyarakat memiliki kendala untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi. Keberadaan sekolah juga memberikan pengaruh dalam proses pendidikan di Indonesia.

5. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di Indonesia. Dibuktikan dengan pengaruh orang tua cukup dominan karena anak membutuhkan perhatian dan bimbingan serta kebutuhan finansial pendidikan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka implikasi yang dapat diberikan untuk pemerintah serta masyarakat terkait dengan angka partisipasi sekolah di Indonesia adalah :

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi masih rendah. Sebaiknya pemerintah memberikan anggaran pendidikan dari hasil Pendapatan Asli Daerah. Walaupun sudah ada program biaya pendidikan akan lebih baik jika program itu tepat sasaran untuk masyarakat yang secara ekonomi masih rendah.
2. Diharapkan peran Kementerian Pendidikan dan Dikti di Indonesia agar memberikan anggaran dana serta kebijakan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh pendidikan tingkat tinggi di Indonesia. Mayoritas dana pendidikan di gunakan untuk membiayai sekolah menengah ke atas dan ke bawah sehingga pendidikan tinggi susah untuk di dapatkan.
3. Pemerintah harus mensejahterakan para guru di Indonesia. Hal ini karena setiap peningkatan 1 persen rasio guru terhadap murid akan meningkatkan angka partisipasi sekolah sebesar 0,687656%. Hal kedepan yang pertama dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah guru yang ada agar beban dapat di tingkat ini terus berkurang, sehingga kontrol pendidikan semakin baik. Tersedianya guru merupakan penyediaan sara public yang wajib di setiap provinsi di Indonesia,

karena peran guru memiliki peran input bagi pendidikan sehingga menciptakan output yang berkualitas bagi masyarakat.

4. Pemerintah sebaiknya membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin untuk bisa mengurangi persentase kemiskinan serta meningkatkan perekonomian. Bantuan dari pemerintah maupun swasta sangat di perlukan untuk mendukung masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat tinggi. Bantuan pendidikan bisa berupa beasiswa bagi individu yang memiliki prestasi dalam bidangnya. Jika tidak ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi pemerintah bisa mendukung individu sebagai *entrepreneur* sehingga mereka tidak perlu bekerja di perusahaan namun akan membuka lapangan pekerjaan dengan usaha yang dibangun sendiri.

5. Pendapatan masyarakat merupakan pengaruh bagi pendidikan, jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong perekonomian sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi agar pendidikan tinggi dapat di peroleh lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia, diambil 28 September 2017, dari <https://www.bps.go.id/>
- Gujarati, D.N. 2003. *Basic Econometrics*. New York : Mc.Graw-Hill.
- Gujarati, D.N.,2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Jakarta : Salemba Empat, buku 2, Edisi 5.
- Huda, Noval Akhmad dan Hadi Sasana. 2013. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap *Outcomes* Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta). *Diponegoro Journal Of Economics Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1.*
- Julianis. 2015. Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2 (168 - 183)*
- Khairunnisa dan Sri Hatoyo (2011), “Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat”, Depok, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.13 No. 2*
- Khotijah, Umi (2015), “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mujiyati dan Heppy Purbasari. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf, Dan Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 Dan 2011. Seminar Nasional Dan *Call For Paper* Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 JUNI 2014
- Niken, Lestari Ajeng (2011), “Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Serta Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nur,Berlina VA (2011), “Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun ” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 17 No.1.*

- Nia, Pegas Elisa (2012), “Pengaruh Kemiskinan dan Tenaga Pengajar Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kalimantan Barat”, Jurnal Curvanomic Vol. 3, No. 3
- Pertiwi, Ageng Sri (2009), “Pengaruh karakteristik wilayah terhadap pemerataan Angka Partisipasi Sekolah Menengah Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Magetan”, Jurnal Ekonomi Vol. 4 No. 1
- Ramadhan, Wildan Noor & Riatu (2014), “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”, Depok : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmatin, Ummy Zulfa dan Soejoto, Ady. 2017. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya. Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan Vol. 01 No. 02 November 2017 Hal. 127 – 140
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Solechah (2010), “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan” Semarang: Universitas Diponegoro.
- Septiana, Citra dan Hutapia (2008) “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah di Sumatra”, Thesis Fakultas Ekonomi, Universitas Bengkulu.
- Ummy, Rahmatin Zulfa (2017), “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Surabaya.”, Jurnal Unesa Vol. 1 No.2
- Widarjono, Agus. (2009), Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga Ekonisia, Yogyakarta.

Lampiran I

Data Angka Partisipasi Sekolah Usia 19-24 Tahun di Indonesia

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	27.68	28.55	29.18	32.93	33.07
SUMATERA UTARA	16.94	17.27	21.81	24.82	25.16
SUMATERA BARAT	23.95	27.55	30.66	32.89	33.13
RIAU	15.34	15.81	22.04	24.48	24.85
JAMBI	15.64	15.22	20.25	22.11	22.22
SUMATERA SELATAN	12.75	13.91	14.08	16.87	17
BENGKULU	17.02	19.64	24.12	28.14	28.37
LAMPUNG	10.39	11.9	16.19	18.67	18.81
KEP BANGKA BELITUNG	8.63	9.3	9.46	12.22	12.73
KEP. RIAU	9.67	10.14	14.85	17.4	17.69
DKI JAKARTA	17.83	18.02	19.65	22.52	22.71
JAWA BARAT	11.15	12.25	17.34	19.27	19.4
JAWA TENGAH	11.51	11.83	17.42	20.48	20.57
DI YOGYAKARTA	44.17	44.69	45.86	49.08	49.17
JAWA TIMUR	12.69	14.59	19.49	21.84	21.95
BANTEN	13.56	15.97	18.08	19.61	19.68
BALI	18.93	18.99	19.84	23.59	23.75
NTB	16.99	17.82	22.64	26.73	26.84
NTT	17.4	17.92	22.88	26.22	26.54
KALIMANTAN BARAT	11.94	14.17	19.27	23.18	23.32
KALIMANTAN TENGAH	13.05	14.04	19.89	22.31	22.47
KALIMANTAN SELATAN	13.62	16.48	16.95	20.36	20.53
KALIMANTAN TIMUR	16.92	20.33	25.04	27.34	27.55
KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	17.87
SULAWESI UTARA	15.16	16.12	16.36	20.91	21.31
SULAWESI TENGAH	16.72	16.74	21.76	25.05	25.13
SULAWESI SELATAN	21.46	23.17	27.8	30.23	30.64
SULAWESI TENGGARA	21.48	23.62	24	28.78	28.89
GORONTALO	19.85	20.46	23.27	27.94	28.38
SULAWESI BARAT	13.03	14.65	18.04	21.53	21.97
MALUKU	26.71	28.98	33.8	36.44	36.6
MALUKU UTARA	19.33	21.79	26.42	30.85	31.25
PAPUA BARAT	16.46	20.03	24.1	29.66	29.96
PAPUA	12.81	13.86	17.5	22.48	22.55

Lampiran II
Data Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	11.25	9.23	8.93	14.92	16.88
Sumatera Utara	71.01	54.91	56.70	56.83	57.59
Sumatera Barat	54.70	44.04	41.44	47.56	46.31
Riau	35.14	33.25	36.40	39.90	50.31
Jambi	40.83	41.14	32.88	40.48	39.66
Sumatera Selatan	45.52	38.46	39.65	38.75	42.31
Bengkulu	36.78	31.07	29.98	33.84	32.16
Lampung	50.20	56.95	49.50	50.25	46.94
DKI Jakarta	61.44	60.98	64.23	71.36	76.20
Jawa Barat	74.97	55.90	59.35	67.40	66.78
Jawa Tengah	71.23	53.54	55.54	65.42	64.80
DI Yogyakarta	49.34	41.34	44.34	46.65	46.86
Jawa Timur	76.87	78.70	63.51	69.53	69.29
Kalimantan Barat	42.18	39.24	41.48	43.59	41.80
Kalimantan Tengah	38.99	31.51	34.96	40.06	36.12
Kalimantan Selatan	56.78	63.46	62.97	60.48	56.56
Kalimantan Timur	40.95	47.19	44.53	59.04	52.30
Sulawesi Utara	35.86	31.99	33.93	40.40	40.07
Sulawesi Tengah	27.87	26.24	28.60	33.79	31.19
Sulawesi Selatan	62.04	51.04	51.52	55.04	53.57
Sulawesi Tenggara	34.53	28.85	21.97	27.40	26.99
Prov. Bali	58.29	53.89	54.09	63.80	61.22
Nusa Tenggara Barat	44.37	32.19	32.19	39.97	39.80
Nusa Tenggara Timur	28.53	17.65	18.56	27.38	26.61
Maluku	20.12	17.25	19.04	23.34	18.33
Papua	5.67	5.53	4.98	8.82	7.73
Maluku Utara	11.13	8.32	10.01	13.46	13.11
Banten	71.09	76.41	62.57	69.31	67.86

Bangka Belitung	32.75	30.37	30.22	30.30	30.30
Gorontalo	19.28	17.70	18.37	23.32	20.84
Kepulauan Riau	28.66	28.08	27.84	36.66	40.30
Papua Barat	2.92	3.45	3.34	5.32	5.53
Sulawesi Barat	15.91	14.18	15.04	17.95	18.56

Lampiran III

Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Indonesia

PROVINSI	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	1,030,263,846,118	1,007,302,210,259	738,233,575,032	1,373,618,167,628	2,336,075,383,043
SUMATERA UTARA	396,536,046,075	412,184,270,366	272,543,533,998	329,608,956,818	329,959,730,363
SUMATERA BARAT	130,239,696,853	124,173,829,798	151,520,331,726	158,701,050,009	810,449,861,624
RIAU	58,133,713,288	803,249,646,961	743,331,155,020	644,529,462,303	1,382,208,961,168
JAMBI	168,837,210,739	236,306,863,153	233,974,332,653	283,238,590,669	314,247,171,964
SUMATERA SELATAN	298,218,433,000	281,096,408,000	337,021,184,000	371,147,965,000	255,550,031,769
BENGKULU	82,986,410,132	136,360,611,248	159,048,793,718	180,421,287,002	197,514,365,788
LAMPUNG	213,459,272,605	298,806,237,605	338,545,461,000	331,048,200,945	337,257,917,336
KEP BANGKA BELITUNG	8,115,163,181,942	10,120,365,568,055	12,815,350,539,684	8,764,860,112,133	8,841,847,633,717
KEP. RIAU	684,529,308,693	735,730,856,013	831,949,527,205	684,577,721,894	900,284,557,810
DKI JAKARTA	307,026,510,000	301,254,205,000	318,510,751,000	324,253,729,000	388,482,721,000
JAWA BARAT	254,362,678,225	273,588,253,822	251,362,429,396	326,872,544,761	352,403,703,595
JAWA TENGAH	384,641,479,231	448,573,063,000	514,845,599,000	531,299,931,000	544,119,084,350
DI YOGYAKARTA	93,055,002,800	87,581,730,550	128,644,589,300	160,405,672,600	814,629,388,562
JAWA TIMUR	242,010,571,	219,000,343,8	215,132,728,5	332,832,312,9	650,549,514,8

	054	84	04	86	18
BANTEN	373,658,067,000	190,178,550,000	389,798,706,000	459,991,043,963	475,709,072,309
BALI	360,197,338,740	389,328,821,000	804,208,225,000	904,661,929,230	442,594,315,012
NTB	121,614,814,100	123,834,459,600	115,954,361,000	110,975,283,800	116,230,161,500
NTT	91,968,600,295	105,714,498,332	135,804,193,735	140,426,440,638	157,136,564,367
KALIMANTAN BARAT	105,652,512,196	129,691,457,330	119,066,994,294	228,154,478,942	580,317,516,511
KALIMANTAN TENGAH	56,641,463,760	89,607,216,145	87,481,153,470	437,911,951,600	101,020,841,700
KALIMANTAN SELATAN	219,402,110,112	219,903,959,752	237,859,141,195	915,535,678,114	446,742,317,424
KALIMANTAN TIMUR	39,136,918,925	43,995,742,760	45,331,746,600	61,615,966,300	63,802,906,220
SULAWESI UTARA	95,201,917,100	91,083,795,500	87,184,517,700	65,216,268,000	78,607,369,900
SULAWESI TENGAH	144,827,299,455	104,266,220,752	92,018,023,842	128,018,381,182	178,640,466,163
SULAWESI SELATAN	263,012,559,400	300,659,144,000	218,340,884,000	154,490,959,100	390,481,962,000
SULAWESI TENGGARA	19,507,619,000	32,921,209,000	44,536,935,000	53,248,174,000	116,006,490,000
GORONTALO	216,153,651,273	250,023,567,330	301,333,060,400	341,898,260,400	394,603,407,700
SULAWESI BARAT	28,236,041,049	43,270,960,197	69,946,739,502	84,726,052,966	377,399,727,101
MALUKU	76,189,343,803	108,190,083,704	117,485,120,401	93,309,138,308	108,586,884,505
MALUKU UTARA	243,248,223,000	265,251,680,000	375,530,806,740	319,951,751,024	373,800,663,828
PAPUA BARAT	132,808,456,500	138,465,851,000	135,261,850,000	244,050,815,167	129,816,280,001
PAPUA	39,415,207,369	51,253,443,010	48,824,503,455	60,614,253,425	294,749,963,969

Lampiran IV
Data Rasio Guru Per Murid di Indonesia

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	8.292	8.793	8.772	10.752	10.228
Sumatera Utara	5.424	5.917	5.637	7.228	6.286
Sumatera Barat	6.894	7.307	7.384	8.565	7.776
Riau	6.341	7.259	7.094	7.613	7.045
Kepulauan Riau	6.124	6.687	6.826	8.358	7.784
Jambi	5.719	6.179	6.173	7.603	6.677
Sumatera Selatan	6.713	7.563	6.978	8.397	7.662
Kepulauan Bangka Belitung	5.953	6.194	6.239	8.142	6.988
Bengkulu	5.940	5.928	5.759	6.356	5.793
Lampung	6.597	6.940	6.956	6.572	6.020
DKI Jakarta	4.946	5.808	5.479	6.071	5.204
Jawa Barat	5.627	6.011	4.889	5.865	5.134
Banten	5.195	5.848	6.169	7.157	6.454
Jawa Tengah	7.552	9.371	8.539	8.666	7.555
DI Yogyakarta	6.537	7.233	6.955	8.276	7.372
Jawa Timur	4.998	5.496	5.361	6.118	5.286
Bali	5.559	6.256	5.932	7.034	6.324
Nusa Tenggara Barat	7.381	8.372	8.656	10.456	9.381
Nusa Tenggara Timur	4.781	5.450	5.641	7.153	6.969
Kalimantan Barat	4.971	5.905	6.085	7.228	6.537
Kalimantan Tengah	6.675	7.537	7.411	9.003	8.315
Kalimantan Selatan	6.388	8.125	9.105	8.503	7.910
Kalimantan Timur	6.205	6.680	6.444	6.870	6.235
Sulawesi Utara	6.110	6.436	8.020	7.948	7.346
Gorontalo	6.284	6.790	6.888	8.295	7.852
Sulawesi Tengah	6.282	7.089	7.258	8.390	7.680
Sulawesi Selatan	6.936	7.926	8.209	8.785	7.884
Sulawesi Barat	5.985	6.556	6.545	7.579	7.089
Sulawesi Tenggara	6.259	7.142	6.589	8.669	8.132
Maluku	6.362	7.140	6.739	8.593	8.171
Maluku Utara	5.245	5.855	5.803	8.019	7.701
Papua	4.195	4.386	7.088	6.799	6.495
Papua Barat	3.956	9.619	4.608	5.538	4.971

Lampiran V

Data Prosentase Kemiskinan di Indonesia

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	19.57	18.58	17.72	16.98	17.11
SUMATERA UTARA	11.33	10.41	10.39	9.85	10.79
SUMATERA BARAT	9.04	8	7.56	6.89	6.71
RIAU	8.47	8.05	8.42	7.99	8.82
JAMBI	8.65	8.28	8.41	8.39	9.12
SUMATERA SELATAN	14.24	13.48	14.06	13.62	13.77
BENGKULU	17.5	17.51	17.75	17.09	17.16
LAMPUNG	16.93	15.65	14.39	14.21	13.53
KEP BANGKA BELITUNG	5.75	5.37	5.25	4.97	4.83
KEP. RIAU	7.4	6.83	6.35	6.4	5.78
DKI JAKARTA	3.75	3.7	3.72	4.09	3.61
JAWA BARAT	10.65	9.89	9.61	9.18	9.57
JAWA TENGAH	15.76	14.98	14.44	13.58	13.32
DI YOGYAKARTA	16.08	15.88	15.03	14.55	13.16
JAWA TIMUR	14.23	13.08	12.73	12.28	12.28
BANTEN	6.32	5.71	5.89	5.51	5.75
BALI	4.2	3.95	4.49	4.76	5.25
NTB	19.73	18.02	17.25	17.05	16.54
NTT	21.23	20.41	20.24	19.6	22.58
KALIMANTAN BARAT	8.6	7.96	8.74	8.07	8.44
KALIMANTAN TENGAH	6.56	6.19	6.23	6.07	5.91
KALIMANTAN SELATAN	5.29	5.01	4.76	4.81	4.72
KALIMANTAN TIMUR	6.77	6.38	6.38	6.31	6.1
KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	6.32
SULAWESI UTARA	8.51	7.64	8.5	8.26	8.98
SULAWESI TENGAH	15.83	14.94	14.32	13.61	14.07
SULAWESI SELATAN	10.29	9.82	10.32	9.54	10.12
SULAWESI TENGGARA	14.56	13.06	13.73	12.77	13.74
GORONTALO	18.75	17.22	18.01	17.41	18.16
SULAWESI BARAT	13.89	13.01	12.23	12.05	11.9
MALUKU	23	20.76	19.27	18.44	19.36
MALUKU UTARA	9.18	8.06	7.64	7.41	6.22
PAPUA BARAT	31.92	27.04	27.14	26.26	25.73
PAPUA	31.98	30.66	31.53	27.8	28.4
	12.49	11.66	11.47	10.96	11.13

Lampiran VI
Data PDRB per Kapita di Indonesia

	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	23428.63	24294.69	25218.83	26065.08	25785.95
SUMATERA UTARA	28518.19	31109.35	34544.18	37913.90	41019.54
SUMATERA BARAT	24056.68	26286.16	28994.48	32141.09	34525.55
RIAU	84811.19	94996.15	100691.44	109784.64	102789.58
JAMBI	32682.04	35657.57	39553.64	43300.30	45591.97
SUMATERA SELATAN	29830.37	32830.49	35810.16	38584.88	41341.24
BENGKULU	18368.80	20298.91	22358.05	24604.40	26847.20
LAMPUNG	21981.47	23910.84	25768.94	28755.17	31195.86
KEP. BANGKA BELITUNG	32465.38	35288.32	38314.56	41948.37	44428.55
KEP. RIAU	72571.75	80240.25	87710.29	94335.33	101132.41
DKI JAKARTA	125533.82	138858.29	155153.92	174914.36	195455.33
JAWA BARAT	23251.17	25272.29	27767.25	30107.21	32644.96
JAWA TENGAH	21162.83	22865.43	24952.13	27517.84	29959.34
DI YOGYAKARTA	20333.34	21744.88	23623.92	25526.40	27573.47
JAWA TIMUR	29613.05	32770.38	36037.18	39832.68	43578.10
BANTEN	27977.01	30202.44	32991.61	36629.18	40027.96
BALI	26433.49	29443.59	33135.15	38099.86	42659.15
NUSA TENGGARA BARAT	14879.83	14853.74	15627.57	17097.66	21479.40
NUSA TENGGARA TIMUR	10194.01	11268.85	12379.02	13599.73	14880.85
KALIMANTAN BARAT	21548.09	23427.05	25561.50	28062.48	30629.61
KALIMANTAN TENGAH	28952.94	31515.97	34367.34	36842.26	40166.84
KALIMANTAN SELATAN	26594.38	28197.08	30058.02	32599.83	34436.00
KALIMANTAN TIMUR	140229.63	145998.48	158472.71	157399.96	146992.80
SULAWESI UTARA	24867.95	27373.41	30121.09	33800.17	37842.34

SULAWESI TENGAH	22547.48	25421.64	28663.64	31874.69	37403.81
SULAWESI SELATAN	24311.67	27670.91	31027.93	35344.88	39942.99
SULAWESI TENGGARA	24302.10	27582.58	29641.12	32115.83	35112.85
GORONTALO	16381.67	18207.86	20154.35	22582.50	25181.10
SULAWESI BARAT	17001.85	18688.25	20457.33	23415.05	25751.29
MALUKU	13604.41	15418.36	17092.99	19099.98	20364.51
MALUKU UTARA	16002.57	17726.06	19230.01	21114.23	22919.86
PAPUA BARAT	56305.11	58762.56	63984.19	68463.58	72161.98
PAPUA	37111.15	37935.01	40513.65	43134.25	48010.00

Lampiran VII

Hasil Regresi Data Panel (*Common Effect Model*)

Dependent Variable: APS?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/11/18 Time: 21:27				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058185	0.043581	1.335090	0.1838
DF?	-0.025111	0.036074	-0.696090	0.4874
EDU?	3.79E-15	4.37E-15	0.867018	0.3872
RGS?	1.966682	0.449282	4.377389	0.0000
POV?	0.221870	0.108592	2.043152	0.0427
PPK?	2.04E-08	2.13E-07	0.096155	0.9235
R-squared	0.144240	Mean dependent var		0.215015
Adjusted R-squared	0.117330	S.D. dependent var		0.074582
S.E. of regression	0.070070	Akaike info criterion		-2.442960
Sum squared resid	0.780658	Schwarz criterion		-2.330016
Log likelihood	207.5442	Hannan-Quinn criter.		-2.397112
F-statistic	5.359970	Durbin-Watson stat		0.181540
Prob(F-statistic)	0.000140			

Lampiran VIII

Hasil Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Dependent Variable: APS?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/11/18 Time: 21:28				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.256380	0.043270	5.925139	0.0000
DF?	0.020496	0.050458	0.406211	0.6853
EDU?	8.03E-15	6.02E-15	1.332105	0.1852
RGS?	0.687656	0.266519	2.580135	0.0110
POV?	-1.706016	0.256314	-6.655960	0.0000
PPK?	2.62E-06	3.48E-07	7.529512	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_NAD--C	0.215446			
_SUMUT--C	-0.011983			
_SUMBAR--C	0.029816			
_RIAU--C	-0.230620			
_JAMBI--C	-0.076928			
_SUMSEL--C	-0.026857			
_BENGKULU--C	0.167234			
_LAMPUNG--C	0.023110			
_DKI--C	-0.537021			
_JABAR--C	-0.063668			
_JATENG--C	0.011446			
_DIY--C	0.340425			
_JATIM--C	-0.008967			
_KALBAR--C	-0.050568			
_KALTENG--C	-0.120977			
_KALSEL--C	-0.146619			
_KALTIM--C	-0.365009			
_SULUT--C	-0.072200			
_SULTENG--C	0.068681			
_SULSEL--C	0.030421			
_SULTRA--C	0.093149			
_BALI--C	-0.115892			
_NTB--C	0.154940			
_NTT--C	0.241136			
_MALUKU--C	0.311897			
_PAPUA--C	0.283420			
_BANTEN--C	0.035859			
_BANGBEL--C	-0.130039			
_GORONTALO--C	-0.216188			
_KEPRI--C	0.180680			

_PABAR--C	-0.292026			
_SULBAR--C	0.246064			
_MALUT--C	0.031839			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.917635	Mean dependent var	0.215015	
Adjusted R-squared	0.893639	S.D. dependent var	0.074582	
S.E. of regression	0.024323	Akaike info criterion	-4.395914	
Sum squared resid	0.075136	Schwarz criterion	-3.680605	
Log likelihood	400.6629	Hannan-Quinn criter.	-4.105545	
F-statistic	38.24116	Durbin-Watson stat	1.285420	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran IX

Hasil Regresi Data Panel (*Random Effect Model*)

Dependent Variable: APS?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/11/18 Time: 21:28				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.113732	0.035584	3.196189	0.0017
DF?	-0.066393	0.039783	-1.668859	0.0971
EDU?	-2.70E-15	4.91E-15	-0.549064	0.5837
RGS?	1.645312	0.241069	6.825080	0.0000
POV?	-0.397380	0.155724	-2.551827	0.0117
PPK?	1.55E-06	2.61E-07	5.931395	0.0000
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	0.075747			
_SUMUT--C	0.025897			
_SUMBAR--C	0.072793			
_RIAU--C	-0.113506			
_JAMBI--C	-0.028912			

Lampiran X

Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: POOL				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	37.266107	(32,127)	0.0000	
Cross-section Chi-square	386.237405	32	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: APS?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/11/18 Time: 21:28				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058185	0.043581	1.335090	0.1838
DF?	-0.025111	0.036074	-0.696090	0.4874
EDU?	3.79E-15	4.37E-15	0.867018	0.3872
RGS?	1.966682	0.449282	4.377389	0.0000
POV?	0.221870	0.108592	2.043152	0.0427
PPK?	2.04E-08	2.13E-07	0.096155	0.9235
R-squared	0.144240	Mean dependent var	0.215015	
Adjusted R-squared	0.117330	S.D. dependent var	0.074582	
S.E. of regression	0.070070	Akaike info criterion	-2.442960	
Sum squared resid	0.780658	Schwarz criterion	-2.330016	
Log likelihood	207.5442	Hannan-Quinn criter.	-2.397112	
F-statistic	5.359970	Durbin-Watson stat	0.181540	
Prob(F-statistic)	0.000140			

Lampiran XI
Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Pool: POOL				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		89.511576	5	0.0000
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
DF?	0.020496	-0.066393	0.000963	0.0051
EDU?	0.000000	-0.000000	0.000000	0.0021
RGS?	0.687656	1.645312	0.012919	0.0000
POV?	-1.706016	-0.397380	0.041447	0.0000
PPK?	0.000003	0.000002	0.000000	0.0000
Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: APS?				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/11/18 Time: 21:29				
Sample: 2011 2015				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.256380	0.043270	5.925139	0.0000
DF?	0.020496	0.050458	0.406211	0.6853
EDU?	8.03E-15	6.02E-15	1.332105	0.1852
RGS?	0.687656	0.266519	2.580135	0.0110
POV?	-1.706016	0.256314	-6.655960	0.0000
PPK?	2.62E-06	3.48E-07	7.529512	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.917635	Mean dependent var	0.215015	
Adjusted R-squared	0.893639	S.D. dependent var	0.074582	
S.E. of regression	0.024323	Akaike info criterion	-4.395914	

Sum squared resid	0.075136	Schwarz criterion	-3.680605
Log likelihood	400.6629	Hannan-Quinn criter.	-4.105545
F-statistic	38.24116	Durbin-Watson stat	1.285420
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran XII

Hasil Statistik Deskriptif Data Panel

	APS?	EDU?	DF?	RGS?	POV?	PPK?
Mean	0.215015	5.73E+11	0.393159	0.069413	0.122504	40911.46
Maximum	0.491700	1.28E+13	0.786960	0.107520	0.319800	195455.3
Minimum	0.086300	1.95E+10	0.029230	0.039560	0.036100	10194.01
Std. Dev.	0.074582	1.67E+12	0.190846	0.012396	0.064328	34376.92
Observations	165	165	165	165	165	165
Cross sections	33	33	33	33	33	33